

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Oesi, (2013). *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ash-Shiddiqy, Mohammad Hasbi. (2012). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul*, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk¹. (2009). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2009*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- . (2010). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2010*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- . (2011). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2011*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- . (2012). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2012*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- . (2013). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2013*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- . (2014). *Kabupaten Nganjuk Dalam Angka 2014*. Nganjuk: BPS Kabupaten Nganjuk
- Dariwardani, Ni Made Inna dan Amani, Siti Noor. (2010). Kinerja Provinsi di Indonesia Sebelum dan Setelah Pemberlakuan Otonomi Daerah. *Jurnal Adminitrasi Negara STIA LAN* Vol. 1 (1)
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Huda, Nurul dkk. (2012). *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Kompas Online. (2012). *Mendagri: 70 persen Pemekaran Daerah Gagal*. <http://nasional.kompas.com/read/2012/12/15/06072741/Mendagri.70.Persen.Pemekaran.Daerah.Gagal> (Diperoleh pada 6 Oktober 2014)

- Kuncoro, Haryo. (2007), *Fenomena Flypaper Effect Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*, Simposium Nasional Akuntansi X
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan. (tanpa tahun). Wikipedia Ensiklopedia Bebas. http://id.wikipedia.org/wiki/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan (Diperoleh pada tanggal 9 Desember 2014)
- Pemerintah Republik Indonesia¹. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta. <http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU172003.pdf> (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014)
- ². (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Jakarta. <http://prokum.esdm.go.id/uu/2004/UU-32-2004.PDF> (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014)
- ³. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/_website/files/35/File/UU%2033%20tahun%202004.pdf (Diperoleh pada tanggal 10 Nopember 2014)
- ⁴. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta. <http://www.bappenas.go.id/files/5913/5228/3067/pp-no-58-tahun-2005-tentang-pengelolaan-keuangan-daerah.pdf> (Diperoleh pada tanggal 6 Oktober 2014)
- ⁵. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Jakarta. http://hukum.unsrat.ac.id/pp/pp_8_2008.pdf
- PortalKBR. (2013). *Mendagri : Tiga Perempat Otonomi Baru Gagal*. http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3074237_4202.html (Diperoleh pada 6 Oktober 2014)
- Rasjid, H. Sulaiman. (1992). *Fiqh Islam* Cet. kedua puluh lima. Bandung: Sinar Baru
- Rista, Alma. (2013). *Manajemen Keuangan Negara Islam*. <http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/05/keuangan-negara-dalam-islam.html> (Diperoleh pada 10 Nopember 2014)
- Sakti, Adhidian Fajar. (2007). *Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di*

Kabupaten Sukoharjo, Skripsi (Tidak diterbitkan). Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Savitry, Ermitha. (2013). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 Di Kota Makassar*, Skripsi (tidak dipublikasikan). Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sularso, Havid. (2011). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Media Riset Akuntansi* Vol. 1 (2)
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Susantih, Heny dan Saftiana, Yulia. (2008). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. *Jurnal Pascasarjana Universitas Sriwijaya* Vol. 2 (3)
- The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi. (2013). *Sosialisasi Parameter Evaluasi & Monitoring Otonomi Daerah Melalui Kompetisi Kemajuan dan Pemingkatan Otonomi Award Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur*.
<http://pustaka.jpip.or.id/images/pustaka/Sosialisasi%20OA%202013-JPIP%20%5BCompatibility%20Mode%5D.pdf> (Diperoleh pada 1 Desember 2014)
- Tribun Batam. (2014). *57 Daerah Otonomi yang Melakukan Pemekaran Gagal Berkembang*. <http://batam.tribunnews.com/2014/05/03/57-daerah-otonomi-yang-melakukan-pemekaran-gagal-berkembang> (Diperoleh pada 6 Oktober 2014)
- Wulandari, Anita. (2001). Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik* Vol 5 No 2 November. (Online) (<http://www.scribd.com/doc/101754251/JAUJ-Vol-09-No-2-Desember-2011> Diperoleh tanggal 26 November 2014).
- Yuliati. (2001). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.